



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta ridho-Nya, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 telah tersusun melalui proses penyusunan yang di dasarkan pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 ini merangkum program - program perencanaan, kegiatan - kegiatan, indikator capaian kinerja serta pagu indikator, dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor Perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan perencanaan yang baik diharapkan program - program dan kegiatan - kegiatan yang dianjurkan benar - benar memberikan hasil yang maksimal sehingga harapan terwujudnya Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon pada umumnya dapat dicapai.

Disadari bahwa rencana kerja ini masih terdapat kekurangan, dengan itikad baik bersama dan dukungan dari semua pihak diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis yang akan menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021-2026, yang tentunya harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Cilegon.

Akhir kata, kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon Khususnya di bidang perhubungan dalam kurun Tahun 2021 - 2026. Atas partisipasi segenap pemangku kepentingan di Kota Cilegon dalam proses penyusunan ini, kami ucapkan terimakasih.

Cilegon, September 2021
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON**

H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP. 19681006 198803 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya PD.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	30
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah.....	34
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Povinsi dan Kementerian Perhubungan.....	36
3.4 Telaahan RTRW.....	41
3.5 Telaahan KHLS.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	49
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1 Strategi.....	53
5.2 Arah Kebijakan.....	53
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1 Program.....	56
6.2 Kegiatan.....	58
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan.....	64
BAB VIII Penutup	
8.1 Penutup.....	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu system yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam system transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain: kelaikan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain.

Posisi geografis Kota Cilegon yang sangat strategis yaitu menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa di Kota Cilegon yang berkembang pesat, menjadikan sektor perhubungan menjadi salah satu aspek terpenting untuk mendukung hal tersebut.

Oleh karena itu, terpenuhinya pelayanan perhubungan darat, pelayanan perhubungan laut,, serta tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Cilegon.

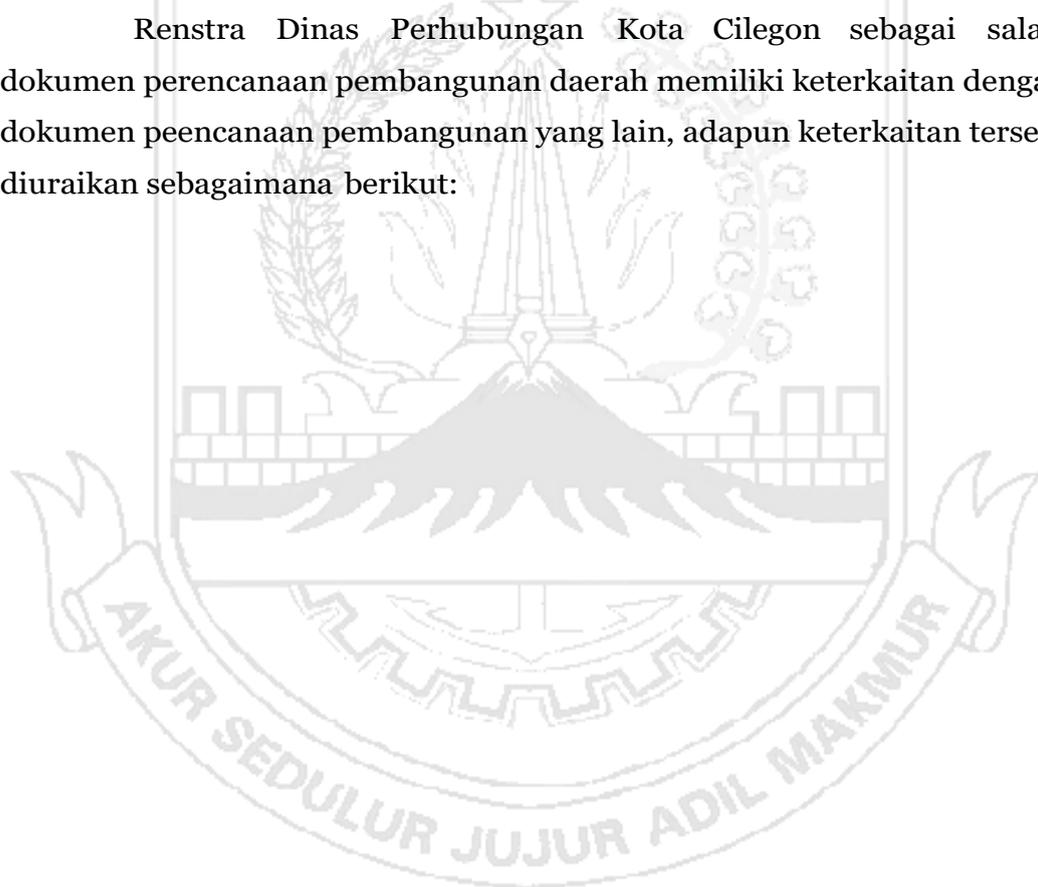
Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam sektor perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.



Untuk melaksanakan urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Cilegon memiliki 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

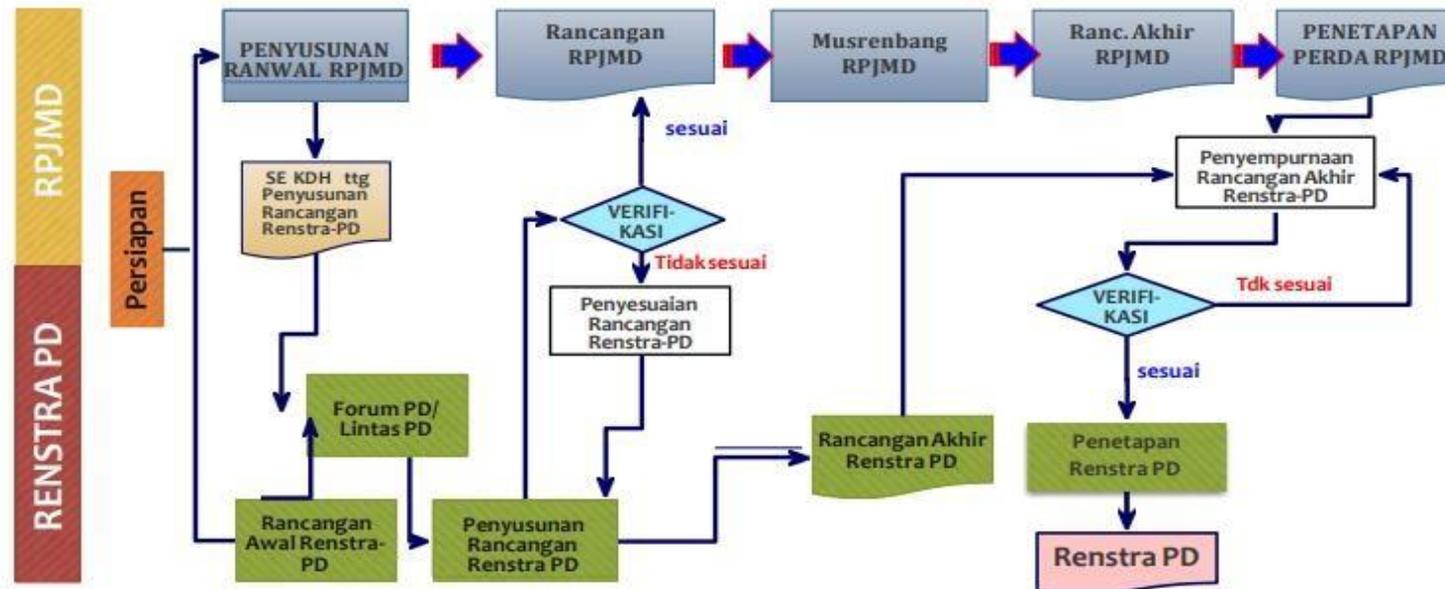
Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban untuk mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan dan merealisasikan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, adapun keterkaitan tersebut diuraikan sebagaimana berikut:





KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD





A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kota Cilegon dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten, merupakan dokumen yang dijadikan pedoman pemutahiran Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang bersifat indikatif.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang Perhubungan, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA OPD harus selaras dengan RPJMD, dimana pengertian Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

B. Rencana Strategis SKPD

Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan, Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon disusun melalui empat tahapan penyusunan, sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon; yaitu tahapan awal meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan persiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.



- b. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon; yaitu tahapan lanjutan dengan melakukan perumusan dan penyajian rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- c. Tahapan penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon; merupakan tahap penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.
- d. Tahapan penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon; adalah tahapan dimana rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon diverifikasi oleh Bappeda Kota Cilegon dan diajukan kepada Walikota Cilegon untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota Cilegon.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Program dan Kegiatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99).
16. Perda Kota Cilegon No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026.
17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan adalah menyusun agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Kota Cilegon yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2021-2026. Juga untuk memberikan arahan operasional sasaran program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada setiap tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Cilegon ini adalah:

1. Teridentifikasinya potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan;



3. Tersusunnya konsistensi perencanaan dalam pemilihan sasaran program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Cilegon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
4. Memberikan gambaran tolok ukur Pertanggung Jawaban Walikota melalui Kepala Dinas/Instansi selaku pembantu operasional dan teknis di lapangan pada setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISSUE STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini menyajikan tentang Telaahan dokumen yang dianggap penting dalam penyusunan Reencana Strategis Perangkat Daerah Supaya isu-isu strategis perangkat daerah dapat ditentukan dengan lebih akurat dan relevan.



BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah disertai juga indikator kinerjanya.

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengemukakan secara eksplisit rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi tentang Penutup Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon dinyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa.

Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (multiplier effect) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat, Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan dalam bidang transportasi.

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Kota Cilegon, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan merupakan bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kota Cilegon ,yaitu dalam hal pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi melalui pengembangan serta pembangunan infrastruktur, sarana prasana dan fasilitas pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;



3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 3. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Keselamatan Lalu Lintas
 1. Seksi Pengendalian Keselamatan;
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- e. Bidang Pelayaran
 1. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Prasarana dan Keselamatan Pelayaran.
- f. Bidang Teknik Sanara Prasarana
 1. Seksi Sarana
 2. Seksi Prasarana
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Prasarana Perhubungan.
 1. Kasubag TU.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir.

Tugas pokok dan fungsi menurut struktur jabatan dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan Dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan Dinas serta menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Dinas agar selaras dengan perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepada Kepala Dinas, dalam pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
- c. penghimpunan rencana kerja Dinas;
- d. penyelenggaraan visi dan misi Dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- g. pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada Sekretariat;



- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan tiap-tiap Bidang pada Dinas;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Dinas;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat.

C. Bidang Keselamatan Lalu Lintas

Bidang Keselamatan Lalulintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Perhubungan Darat, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Keselamatan Lalu lintas, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Lalu Lintas kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Keselamatan lalu Lintas berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Keselamatan Lalu lintas
- c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- d. penyelenggaraan Bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang Keselamatan Lalu Lintas;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Keselamatan Lalu Lintas.

D. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan penyusunan program dan



pengendalian anggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Pelayaran, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Pelayaran, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pelayaran kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pelayaran berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :



- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Pelayaran;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayaran;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Pelayaran;
- d. penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Pelayaran;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang Pelayaran;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayaran.

F. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- d. penyelenggaraan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang teknik sarana dan prasarana;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang teknik sarana dan prasarana;



- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir

Tugas pokok dan fungsi menurut struktur jabatan dalam susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di bidang perparkiran, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di UPTD Perparkiran berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi menurut struktur jabatan dalam susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala UPTD Terminal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di bidang pengelolaan terminal, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di UPTD Terminal berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



H. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam point (1) dipimpin oleh pegawai yang paling senior dan Bersertifikasi.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja unit pelaksana teknis dinas.

2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perhubungan Kota Cilegon

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 berjumlah 257 orang dengan perincian sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 93 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 18 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 140 orang.

Tabel.2.1. Keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kota Cilegon

NO	PEGAWAI	GOLONGAN PNS				PENDIDIKAN FORMAL								JML
		IV	III	II	I	S2	S1	DIII	D II	SLTA	SLTP	SD		
1	PNS	7	48	36	2	23	30	3	-	39	4	-	93	
2	TKK					-	9	1	-	8	-	-	18	
3	THL					-	35	8	2	89	5	1	140	
4	TKS													
5	TKS NON SP													
JUMLAH		7	48	36	2	23	74	12	2	136	9	1	251	

Tabel.2.2. Keadaan pegawai berdasarkan golongan

	JENIS KELAMIN		GOLONGAN RUANG															
	L	P	I				II				III				IV			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
JUMLAH	84	9	-	-	-	2	0	6	7	21	2	6	21	19	5	1	1	-
TOTAL	93		91															



2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon didukung oleh sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel.2.3. Aset Dinas Perhubungan

Jenis Aset SKPD	Sat	Standar Kebutuhan Aset	Exching Tahun 2021	Standar Kebutuhan Tahun (n)	Ket
1 Gedung dan Bangunan	Buah		6		
2 Kendaraan roda 4	Unit	42	19	28	
3 Kendaraan roda 2	Unit	84	25	70	
4 Kendaraan roda 3	Unit		1		

Dihimpun dari: Kartu Inventaris Ruangan tahun 2021

2.2.3. Terminal

Lokasi terminal yang terdapat di kota cilegon dan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon terdapat di 4 titik wilayah yaitu :

- 1) Terminal Terpadu Merak (TTM); (Sudah di alihkan ke Kementrian)
- 2) Terminal Keranggot; (Alih fungsi menjadi pasar)
- 3) Terminal Seruni;
- 4) Terminal Pasar Merak. (Alih fungsi menjadi pasar)



Untuk Kondisi terminal secara jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.4. Status dan Luas Terminal Kota Cilegon

No	Terminal	Tipe	Luas Tanah / m ²	Luas Bangunan / m ²	Lokasi	Ket
1	TTM	A	66.000	36.624,13	Merak	
2	Seruni	C	±2 Ha	±20.348,49	Cilegon	
3	Keranggot	C	3.285,30	3.285,30	Cilegon	
4	Terminal Merak	C			Merak	

2.2.4. Halte

(2) Lokasi Halte di Wilayah Kota Cilegon

Halte yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon terdapat 13 (tigabelas) Unit.

Tabel.2.5. Lokasi Halte di Wilayah Kota Cilegon

No.	Lokasi Halte	Jumlah	Keterangan
1	Gunung Sugih (ciwandan)	1	Dishub
2	Matahari Lama	1	Dishub
3	Tegalwangi (gerem)	1	Dishub
4	Mardiyuana	1	Dishub
5	Depan Rumah Dinas Walikota Cilegon	1	Dishub
6	Depan Kepolisian Resort Kota Cilegon	1	Dishub
7	PCI 1	1	Dishub
8	PCI 2	1	Dishub
9	Depan MITZUBISI Motor	1	Dishub
10	Depan RSUD	1	Dishub
11	Depan Kantor Walikota	1	Dishub
12	Depan Ex Prima Husada	1	Dishub
13	Depan SMP 3	1	Dishub
JUMLAH		13	



2.2.5. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Aset Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan data tahun 2021 Jenis alat pengujian kendaraan bermotor yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Cilegon terdapat 11 Jenis alat pengujian. Pada table dibawah ini dapat dilihat nama jenis alat uji beserta fungsinya masing-masing :

Tabel.2.6. Aset Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS ALAT UJI	MEREK	TAHUN PENGADAA N	KONDISI
				(Berfungsi/Tidak Berfungsi)
1	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC)	Muller	2015	Berfungsi
2	Alat Uji Ketebalan Asap	Muller	2015	Berfungsi
3	Alat Uji Kebisingan	Digitec	2003	Berfungsi
4	Combination Alat Uji Rem/dan Alat Ukur Berat Kendaraan Statis	Muller	2015	Berfungsi
5	Alat Uji Lampu	Muller	2015	Berfungsi
6.	Alat Uji Kincup Roda Depan	Muller	2015	Berfungsi
7	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	Muller	2015	Berfungsi
8	Alat Pengukur Kendalaman Alur Ban			
9	Alat Pengukur Berat Kendaraan Portable	Muller	2015	Berfungsi
10	Alat Pengukur Dimensi Kendaraan	Kemco	2009	Berfungsi
11	Alat Uji Daya Tembus Cahaya pada Kaca			

2.2.6. Perlengkapan Jalan

Dinas Perhubungan Kota Cilegon memiliki sejumlah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light* dan *warning light*, serta *guardrail* yang



tersebar di wilayah Kota Cilegon. Adapun data jumlah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light*, dan *warning light* yang dimiliki sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.7. Fasilitas Kelengkapan Jalan

No	JENIS RAMBU	JUMLAH
1	Warning Light	7
2	Rambu tiang F	20
3	Rambu RPPJ (120 cm x 180 cm)	30
4	Rambu Lalu Lintas Standar (60 X 60 cm)	53
5	Pagar Pengaman Guardrail	2
6	Traffic Light Simpang 4	1
7	Rambu RPPJ (180 x 240 cm)	14
8	Barrier Glass Road 45 x 76 x 95 cm	64
9	Traffic Cone	200
10	Rambu Portable 30 x 30 x 2 mm	65
11	Paku Jalan	520
12	Cermin Lalu Lintas	25
13	Marka Jalan (m2)	684

Sumber : Diolah dari berbagai sumber Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

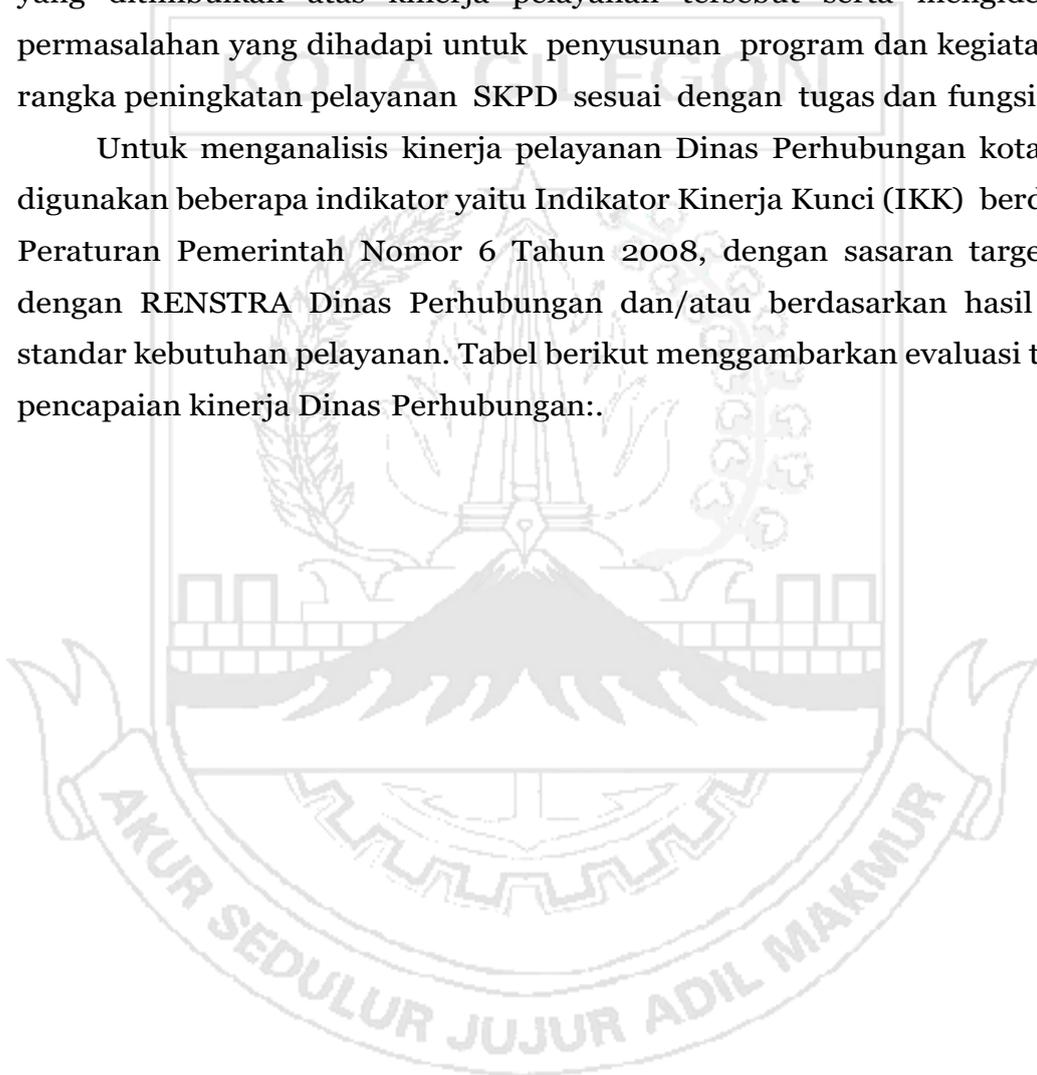
Salah satu tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan adalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA merupakan kewajiban



yang harus disusun oleh setiap SKPD yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu lima tahun, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan kota cilegon digunakan beberapa indikator yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan RENSTRA Dinas Perhubungan dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Tabel berikut menggambarkan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Perhubungan:..





RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

Tabel.2.8. Matrik Renstra OPD TAHUN 2021-2026
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kota Cilegon
Table TC-23

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK (*)	Target Indikator Lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun-					Realisasi capaian tahun-					Rasio capaian tahun-					Keterangan	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
Nilai LAKIP Perangkat Daerah				62.32	65.25	68.76	68.80	70.00												
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				60.42	64.23	66.55	67.75	70.00												
Indeks Kepuasan Masyarakat				79.50	79.75	80.10	80.25	80.25												
Rasio Konektivitas Wilayah				300/800 = 50.00	500/800 = 62.50	600/800 = 75.50	700/800 = 87.50	800/800 = 100												
Kinerja Lalulintas Jalan				0,40	0,40	0,42	0,42	0,44												



Diharapkan target dalam periode tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya koordinasi yang efektif dengan OPD dan instansi vertikal.
- b. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan uji berkala dan uji emisi gas buang serta rambu-rambu dan marka parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
- c. Tersediaanya juga Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di Bidang Perhubungan.

Disamping hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai analisa tentang hambatan yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan untuk mencapai target yang telah ditentukan, hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran dari pengguna jalan secara khusus awak angkutan perkotaan dalam menaikan dan menurunkan di tempat yang telah ditentukan.
- b. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Cilegon.
- c. Semakin tingginya mobilitas penduduk di kawasan pusat kota yang belum diimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
- d. Masih rendahnya pendanaan untuk pengadaan sarana dan prasarana lalulintas.
- e. Kurang diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sesuai dengan kondisi pergerakan moda transportasi di wilayah Kota Cilegon.
- f. Pelaksanaan pelayanan belum sebanding dengan rasio pencapaian kinerja program perhubungan, sebagaimana dimuat dalam Tabel berikut ini :



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

**Tabel.2.9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kota Cilegon**

No	Jenis retribusi	Target Anggaran Tahun-					Realisasi PAD pada tahun-					Rasio capaian tahun-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	TERMINAL	65,700,000	65,700,000	66,700,000	40,740,000	70,560,000	87,326,000	60,200,000	60,282,000	42,276,000	26,554,000	132.92	91.63	90.38	104.46	37.63
2	PARKIR TEPI JALAN UMUM	179,172,000	189,420,676	-	246,000,000	420,000,000	153,022,000	8,631,000	0	187,047,000	100,470,000	85.41	4.56	-	76.04	23.92
3	TEMPAT PARKIR KHUSUS	59,760,000	26,000,000	-	100,000,000	71,000,000	58,650,000	29,863,000	0	105,157,900	75,468,500	98.14	114.86	-	105.15	106.29
4	PKB	388,542,118	422,894,480	460,284,054	300,587,623	545,272,000	378,061,500	408,017,500	453,473,000	212,543,000	292,641,500	97.30	96.48	98.52	70.71	53.67
5	IZIN TRAYEK	57,332,000	52,972,000	53,000,000	31,860,000	53,300,000	54,322,320	22,563,380	32,462,000	13,974,000	3,910,000	94.75	42.59	61.25	43.86	7.34
6	PELAYANAN KEPELABU HAN	1,700,000,000	1,400,000,000	-	1,000,000,000	800,000,000	-	-	-	13,691,925	-	-	-	-	1.37	-
	JUMLAH	2,450,506,118	756,987,156	579,984,054	1,719,187,623	1,960,132,000	731,381,820	529,274,880	546,135,000	574,689,825	499,044,000	29.85	69.92	94.18	33.42	25.46



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

Tabel.2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan (T-c.24)
Kota Cilegon

No	Nama Program dan Nama Kegiatan	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio capaian tahun-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PAGU DISHUB	41,488,933,800	45,009,915,816	48,511,965,239	42,710,540,375	55,190,879,143	38,169,394,643	7,775,455,843	11,276,250,843	7,536,712,153	4,292,476,008	92.00	83.93	85.08	87.89	34.33
	BTL	11,935,630,000	10,774,449,358	12,900,876,208	12,632,473,737	15,238,567,448	10,967,282,630	0,431,023,948	2,287,787,214	1,441,272,503		91.89	96.81	95.25	90.57	
	BELANJA LANGSUNG	29,553,303,800	34,235,466,458	35,611,089,031	30,078,066,636	39,080,589,585	27,202,112,013	7,344,431,893	8,988,463,633	6,095,439,650		92.04	79.87	81.40	86.76	
1	Program Dukungan Pelayanan Pemerintah	23,321,330,000	7,644,313,680	10,086,215,692	9,011,032,402	24,754,456,181	22,007,976,404	4,356,834,096	8,394,328,397	8,405,624,540		94.37	83.16	83.23	93.28	
	Program Pengelolaan dan															
2	Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	1,235,380,000	6,327,592,358	3,309,047,467	3,314,959,222	25,123,235,418	1,179,748,800	2,444,765,290	3,144,985,564	3,206,920,322		95.50	38.64	95.04	96.74	
3	Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	1,045,870,000	685,110,420	1,221,455,872	393,559,027	-	1,044,439,600	669,981,920	1,183,417,000	391,617,915		99.86	97.79	96.89	99.51	



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN

4	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,423,623,800	18,676,700,000	20,104,370,000	17,178,665,985	2,456,552,209	17,706,460,580	16,117,772,674	13,915,026,873	71.75	94.81	80.17	81.00		
5	Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut	527,100,000	901,750,000	890,000,000	179,850,000	384,773,290	513,395,000	166,390,000	147,960,000	176,250,000	97.40	18.45	16.62	98.00	



Dari tabel tersebut dapat diketahui kinerja pendapatan dan belanja atas pelayanan sektor perhubungan sebagai berikut :

a). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk kinerja pendapatan dari sector retribusi daerah di bidang perhubungan dari 6 (enam) jenis retribusi dengan hasil capaian tahun sebelumnya pada tahun 2019 mencapai realisasi rasio persentase 94,18% dan tahun 2020 mencapai rasio persentase 33,42% , diantara realisasi anggaran PAD tahun 2019 dan 2020 yang baik dicapai pada tahun 2019 yaitu dengan persentase 94,18 %. ada beberapa jenis retribusi pada tahun 2019 yang tidak memenuhi target yaitu pelayanan parkir jalan umum disebabkan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum diberhentikan berdasarkan rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dimana dalam pengelolaan retribusi harus disediakan dana insentif bagi juru parkir, dan perlu adanya perubahan regulasi dan ketersediaan anggaran, dan pada jenis retribusi ijin trayek tidak memenuhi target disebabkan kurang sadarnya potensi wajib retribusi trayek untuk melakukan perpanjangan ijin trayek.

Untuk kinerja pendapatan retribusi tahun 2020 mencapai rasio persentase 33,42% dikarenakan ada beberapa jenis retribusi yang tidak memenuhi target diantaranya jenis retribusi Pelayanan parkir tepi jalan umum dengan persentase 76,04 % dan ijin trayek dengan persentase 43,86 %, ada kendala yang dialami yaitu dikarenakan pandemi Covid-19.

b). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Sedangkan untuk kinerja belanja daerah total Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2019 sebesar Rp.48.511.965.239 dengan realisasi anggaran Rp.41.276.250.847 mencapai realisasi rasio persentase 85,08% terdiri dari Belanja Pegawai (BTL) 95,25 % dan Belanja Langsung (Belanja Modal) 81,40% , pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp.42.710.540.373 dengan realisasi Rp. 37.536.712.153 mencapai realisasi rasio persentase 87,89% terdiri dari Belanja Pegawai (BTL) 90,57 % dan Belanja Langsung (Belanja Modal) 86,76%. Diliat dari perbandingan kedua tahun tersebut capaian kinerja belanja yang baik pada tahun 2020 dengan rasio



persentase 87,89 % , persentase tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan Belanja Langsung.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan telaah atas RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Cilegon 2020-2040 diketahui bahwa yang menjadi fokus pelayanan dalam lima tahun (2021-2026) adalah terkait dengan beberapa sistem jaringan transportasi, yaitu:

Sistem jaringan transportasi darat yang meliputi;

1. Sistem jaringan informasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Sistem pengembangan IT pelayanan transportasi;
3. Sistem Keselamatan Pelayanan dan Angkutan Penyebrangan;

Sementara itu dari hasil telaah Renstra Dishub Kota Cilegon, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan yaitu:

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing, Dan Informatif Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Belum Optimalnya Fasilitas Pendukung Sarana prasarana Transportasi agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Belum Optimalnya Fasilitas Pendukung Pelayanan kepelabuhanan.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam kegiatan pembangunan daerah, sektor perhubungan mempunyai peranan untuk mendorong proses pembangunan dan aktifitas kegiatan social ekonomi masyarakat sehari-hari. Sektor perhubungan ini dengan hampir seluruh sektor pembangunan.

Sesuai dengan sistem pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 dan peraturan perundangan lain yang terkait, maka pengelolaan bidang perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. Di satu sisi, pembagian kewenangan ini akan mengurangi beban kerja, karena terdistribusi pada masing-masing tingkat pemerintahan, namun di sisi lain menyebabkan kesulitan pada aspek koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan, terutama karena masih besarnya egosektoral di masing-masing pemerintah dan lembaga.

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan maka isu strategi yang diangkat menjadi agenda dan prioritas Dinas Perhubungan Kota Cilegon tahun 2021-2026 adalah :

- 1.** Pelayanan publik yang transparan dan akuntable;
- 2.** Kualitas SDM yang professional dan berintegritas;
- 3.** Penataan transportasi yang baik dan handal;
- 4.** Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota.



Melihat dari Isu Strategis diatas maka point yang terkait kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon adalah “Peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di bidang transportasi,” dan ini sangat relevan dikarenakan Aktivitas sector perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, dimana peran pemerintah mampu memberikan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Mengingat besarnya peranan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sektor transportasi, maka seharusnya peranan pemerintah akan lebih banyak pada aspek fasilitator dan regulator. Dengan demikian aspek peraturan perundangan, penegakan hukum dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat penting.

Pelayanan ini dilakukan dengan berfokus pada optimalisasi daya guna sarana prasarana dan Fasilitas perhubungan melalui Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan berkala, serta pada Optimalisasi pembangunan sarana prasarana dan Fasilitas perhubungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon.

Permasalahan pelayanan publik di bidang transportasi meliputi :

1. Penataan terminal tipe C;
2. Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
3. Pengendalian Operasional Transportasi;
4. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan.

Dalam aspek keselamatan angkutan umum dan pencegahan dampak lingkungan hidup yang disebabkan oleh emisi kendaraan, perlu juga



mendapatkan perhatian pemerintah sehingga perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dalam APBD Kota Cilegon.

Pelayanan Perhubungan Darat Selama periode pembangunan 2021-2026, permasalahan yang dihadapi mencakup kepadatan lalu lintas jalan pada waktu- waktu tertentu, kapasitas jalan yang belum memadai, dan kualitas pelayanan transportasi yang belum optimal.

Kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu cenderung mengalami peningkatan secara kuantitas dikarenakan Kota Cilegon merupakan kota industri perdagangan dan jasa sehingga pada waktu tertentu terjadi peningkatan kuantitas kendaraan. Hal ini juga dipengaruhi oleh perparkiran yang belum tertata dengan baik dan pola pergerakan angkutan kota yang tidak teratur, berdampak pada kapasitas jalan menjadi sempit.

Sementara itu dari segi pelayanan angkutan kota masih mengalami permasalahan yaitu, masih rendahnya kenyamanan, ketepatan waktu perjalanan serta tidak tertibnya pengusaha angkutan kota untuk melakukan kewajiban administrasi izin trayek angkutan kota.

Secara kuantitas jumlah angkutan kota di wilayah Kota Cilegon berdasarkan data Cilegon Dalam Angka tahun 2017 berjumlah 1292 kendaraan.

Pelayanan Perhubungan Laut belum dapat dilakukan karena belum tersedianya sarana dan prasarana navigasi sebagai jasa pelayanan pemerintah.

Keselamatan Pelayaran di Perairan Selat Sunda sangatlah penting karena jalur ini merupakan jalur yang mempunyai aktivitas kapal tersibuk dan terpadat di Indonesia. Selain masih kurangnya sarana dan prasarana navigasi



dan keselamatan pelayaran menyebabkan belum optimalnya pemberian kontribusi terhadap PAD Kota Cilegon.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dari hasil telaahan gambaran pelayanan SKPD, permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu 2021-2026 yaitu:

1. Program Lalulintas dan Angkutan Jalan
 - a. Tingkat kepadatan lalulintas cenderung meningkat secara kuantitas.
 - b. Rendahnya kemampuan aparaturnya dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi perkotaan.
 - c. Belum terpenuhinya pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan.
 - e. Belum terwujudnya lahan parkir perkotaan.
 - f. Belum adanya kaderisasi tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor.
 - g. Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.
2. Program Pelayaran Perhubungan Laut
 - a. Secara kelembagaan akan ada penghapusan dalam SOTK Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
 - b. Tidak tersedianya anggaran untuk Program Pelayaran Perhubungan Laut.



3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Periode 2021-2026

Bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota merupakan hasil proses politik terpilihnya walikota dan wakil walikota secara langsung oleh masyarakat Kota Cilegon,

Maka visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama perumusan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Visi :

Terwujudnya Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Cilegon Baru : Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas

Cilegon Modern : Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi

Cilegon Bermartabat : Bahwa masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya.

Misi :

- 1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel**
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang professional dan akuntabel melalui Membangun command center, Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, Menurunkan tingkat



korupsi, Peningkatan fasilitas infrastruktur, Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, Perizinan satu atap, Meningkatkan fasilitas kota yang baik.

2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui Partisipasi lama sekolah 12 tahun, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling.

4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata

Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.

5. Mewujudkan masyarakat berperadaban

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui Membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, Membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city melalui peningkatan layanan SPBE (baik layanan pemerintahan maupun layanan publik) dan perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi, Membangun masyarakat yang menguasai



IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.

Dalam kaitannya dengan perwujudan visi misi Kota tersebut, Dinas Perhubungan yang memiliki tupoksi melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan masuk dalam misi I dan misi V.

3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan; terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air; terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai standar pelayanan minimal; terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi; meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015- 2019) meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; Strategi :
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 - Penguatan kelembagaan.



2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi; Strategi :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

B. Pelayanan

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

Strategi :

- Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
- Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.

2. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan; Strategi :

- Meningkatkan disiplin dan profesional SDM;
- Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;
- Meningkatkan penyerapan lulusan bidang transportasi.

3. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;

Strategi :

- Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
- Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;



- Penyederhaan perizinan dan penerapan e-government dilingkungan Kemenhub.
4. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi;
- Strategi :
- Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi bidang transportasi.
4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi; Strategi :
- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
 - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan/EBT;
 - Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
6. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance; Strategi :
- Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai consultant dan quality assurance;
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.

C. Kapasitas Transportasi

1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; Strategi :
- Peningkatan kualitas sarana prasaranan angkutan umum massal perkotaan;



- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
 - Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
 - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
2. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil. Strategi :
- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah;
 - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
 - Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.
3. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;
- Penggunaan teknologi intelligent transport system (ITS), pembangunan area traffic control system (ATCS) pada perlengkapan jalan (APILL, PJU warning light).

Selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas transportasi dengan terimplementasinya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan;



2. Terpasangnya fasilitas keselamatan, terbangunnya/pengembangan simpul transportasi;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi dengan terciptanya rencana induk angkutan, rencana induk system informasi lalu lintas, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional dan provinsi;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi).

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra DishubKominfo Provinsi Banten diperlukan dalam upaya sinergitas pembangunan terhadap isu strategis pada program-program prioritas pembangunan pada aspek Perhubungan.

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Banten yang berkaitan dengan kepentingan Kota Cilegon lima tahun ke depan adalah :

1. Program Prioritas Perhubungan Darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;



2. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
3. Program Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan (AKUT);
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

Adapun Renstra Dinas Perhubungan Kota Cilegon telah menyesuaikan dengan Rencana Renstra Kementerian Perhubungan dan Rencana Renstra DishubKominfo Provinsi Banten dengan berorientasi pada terwujudnya kondisi sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang handal dan berkualitas sebagai penunjang kemajuan kawasan-kawasan yang menjadi daerah pertumbuhan di Kota Cilegon.

Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan wilayah Kota Cilegon berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 diarahkan menuju :

A. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi :
 - a. Pusat kegiatan di wilayah Daerah
 - b. Sistem Jaringan Prasarana



2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem Jaringan Prasarana meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Transportasi;
 - b. Sistem Jaringan Energi;
 - c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. Infrastruktur Perkotaan.
3. Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Transportasi Darat;
 - b. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
 - c. Sistem Jaringan Transportasi Laut.
4. Sistem Jaringan Transportasi Darat meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. Sistem Jaringan Kereta Api.
5. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Merak.
6. Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Terminal khusus; dan
 - d. Alur pelayaran.
7. Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - a. jaringan jalan Nasional;
 - b. jaringan jalan Provinsi;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah; dan



- d. Terminal Penumpang.
8. Jaringan Jalan Nasional, meliputi:
 - a. Jalan arteri primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1); dan
 - c. Jalan tol.
9. Jaringan Jalan Arteri Primer yang ada dalam wilayah Daerah, meliputi:
 - a. ruas Jalan Merak- batas Kota Cilegon;
 - b. ruas Jalan batas Kota Cilegon-batas Kota Serang;
 - c. ruas Jalan Akses Tol Merak.
10. Jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang ada dalam wilayah Daerah, meliputi:
 - a. ruas jalan Serdang-Bojonegara-Merak;
 - b. ruas jalan batas Kota Cilegon-Pasauran.
11. Jaringan Jalan tol yang ada dalam wilayah Daerah, meliputi:
 - a. ruas jalan Tangerang-Merak;
 - b. ruas jalan Cilegon-Bojonegara.
12. Jaringan jalan Provinsi merupakan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) meliputi:
 - a. ruas jalan Yasin Beji;
 - b. ruas Jalan Raya Industri
13. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
 - a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Sekunder.
14. Jaringan Jalan Arteri sekunder, meliputi:



- a. ruas Jalan Aat-Rusli (Jalan Lingkar Selatan);
 - b. ruas Jalan Lingkar Utara (JLU).
15. Terminal penumpang, meliputi:
- a. Pengembangan Terminal Penumpang tipe A yaitu Terminal Terpadu Merak Kota Cilegon;
 - b. Pengembangan Terminal Penumpang tipe C meliputi:
 - 1). Terminal Seruni di Kecamatan Cibeber;
 - 2). Terminal kecil dan Pasar Baru Merak di Kecamatan Pulomerak;
 - 3). Terminal Pasar Kranggot di Kecamatan Jombang;
 - 4). Terminal Pasar Kelapa Kavling di Kecamatan Cilegon;
 - 5). Terminal Kecamatan Ciwandan.
16. Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api;
 - b. Stasiun Kereta Api.
17. Jaringan Jalur Kereta Api, merupakan jaringan jalur kereta api umum meliputi:
- a. Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon-Serang-Pandeglang-Rangkasbitung;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak-CilegonSerang-Tangerang-Jakarta;
 - c. Reaktivasi jalur kereta api lintas Ciwandan-Anyer Kidul;
 - d. Rencana pembangunan jalur KA Merak-Bandara Soekarno Hatta;
 - e. Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel Cilegon-Serang-PandeglangRangkasbitung;



- f. Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Merak-Cilegon - Serang - Rangkasbitung Serpong - Tanah Abang; g. Rencana pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di seluruh Kota Cilegon;
 - h. Pembangunan lintas baru Cilegon-Anyer Kidul Labuan-Panimbang
 - i. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja-Rangkasbitung-Merak;
 - j. Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan dengan prioritas tinggi yang menghubungkan Merak-Rangkas Bitung-Jakarta;
 - k. Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang-Cilegon, Tanah Abang-Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan peruntukan industri;
 - l. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (double track) di dalam kawasan perindustrian serta kawasan pelabuhan dan pergudangan;
 - m. mendukung pengaktifan kembali jalur Cilegon-Anyer Kidul; dan
 - n. Rencana pembangunan rel kereta api Stasiun Merak ke Bandara Soekarno-Hatta.
- 18. Stasiun Kereta Api, meliputi:**
- a. Stasiun Penumpang; dan
 - b. Stasiun Barang.
- 19. Stasiun Penumpang meliputi:**
- a. Pengembangan Stasiun Cilegon;
 - b. Pengembangan Stasiun Krenceng;



- c. Pengembangan Stasiun Cigading; dan
- d. Pengembangan Stasiun Merak.
- 20. Stasiun Barang meliputi Pengembangan Stasiun Cigading.
- 21. Pelabuhan Utama, meliputi:
 - a. Rencana Pengembangan Pelabuhan Banten;
 - b. Rencana Pengembangan dan Pelabuhan Warnasari.
- 22. Pelabuhan Pengumpul, meliputi:
 - a. Rencana pengembangan kawasan pelabuhan khusus TUKS Citangkil;
 - b. Rencana pengembangan Terminal Multipurpose KBS Cigading.
 - c. Rencana peningkatan status Pelabuhan Merak Mas;
- 23. Terminal Khusus, meliputi:
 - a. Pengembangan Terminal khusus yang berada di Kecamatan Ciwandan;
 - b. Pengembangan Terminal khusus yang berada di Kecamatan Citangkil;
 - c. Pengembangan Terminal khusus yang berada di Kecamatan Grogol; dan
 - d. Pengembangan Terminal khusus yang berada di Kecamatan Pulomerak.
- 24. Alur Pelayaran, meliputi :
 - a. Alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. Alur pelayaran masuk pelabuhan.

3.5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Definisi KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan



berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau KRP.

Tabel.3.1. Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	NO	NAMA	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres)
	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume angkutan, menurut jenis transportasi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	9.1.2 (a)	Jumlah bandara	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



Tabel.3.2. Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	NO	NAMA	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuannya sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan itu sendiri.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait Sektor Perhubungan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan.

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan layanan pemerintahan dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur dengan indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indeks RB Perangkat Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat.

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan indikator Rata-rata capaian kinerja jaringan jalan dan transportasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas pemukiman dengan indikator Rasio Konektifitas wilayah dan Kinerja Lalulintas Jalan.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

PEMERINTAH KOTA CILEGON
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2021-2026

VISI : Mewujudkan Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Menghadirkan Pemerintah Daerah yang Profesional dan Akuntabel	1.1 Peningkatkan Layanan Pemerintahan	1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur
5	Mewujudkan Masyarakat Berperadaban	5.1 Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang dan Infrastruktur Kota, Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman



Tabel T-C .2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	71.2	75.3	78	82.2	84.2	
			1 Nilai Laki Perangkat Daerah	62.32	65.25	68.76	68.80	70	
			2 Indeks RB Perangkat Daerah	60.42	64.23	66.55	67.75	70	
			3 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79.50	79.75	80.10	80.25	80.25	



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rata-Rata Capaian Pelayanan Jalan dan Transportasi		100	100	100	100	100	
			1	Rasio Konektivitas Wilayah	50.00	62.50	75.00	87.50	100	
			2	Kinerja Lalu Lintas Jalan	0.40	0.40	0.42	0.42	0.44	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, pembangunan jangka menengah daerah Kota Cilegon sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Adapun Rumusan Strategi Tersebut meliputi :

- Peningkatan pelayanan di bidang transportasi
- Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan
- Peningkatkan pengawasan dan pengendalian angkutan serta manajemen lalu lintas.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran adalah :

1. Pengintegrasian layanan dalam satu atap, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat secara berkala beserta tindak lanjutnya
2. Peningkatan kinerja jaringan jalan dan transportasi



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

PEMERINTAH KOTA CILEGON

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENSTRA SKPD

PERIODE: 2021 - 2026

VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
MISI I : Menghadirkan Pemerintah Daerah yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	1.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	1.1.2.1. Pengintegrasian layanan, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

MISI V : Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.1. Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	11.1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur Kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	1.1.2. Meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi	1.1.2.1. Peningkatan kinerja jaringan jalan dan transportasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM

Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya dan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan di bidang perhubungan tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi Banten dan Kementerian Perhubungan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan berserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada periode tahun 2021-2026.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya :

1. Keselarasan antara sasaran program dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cilegon.
2. Program disusun dengan menyesuaikan pada tugas pokok dan fungsi setiap bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
3. Program dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau hanya dalam satu kegiatan.



4. Program harus merupakan cara untuk mendukung prioritas masalah yang akan diselesaikan.
5. Program terintegrasi dalam manajemen anggaran yang berbasis kinerja secara luas, dalam arti bahwa ada kejelasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan jenisnya, program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cilegon tahun 2021-2026 terdiri atas :

- a. Program Generik, yaitu program-program yang dilaksanakan oleh bidang Sekretariat dengan fokus untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).
- b. Program Teknis, yaitu program-program yang fokus pelayanannya pada kelompok sasaran atau masyarakat pengguna jasa pelayanan di bidang perhubungan (pelayanan eksternal).

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program-program yang akan di dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam kurun waktu 2021-2026 antara lain meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator keberhasilan program adalah :
 - a. Nilai Lakip Perangkat Daerah;
 - b. Indeks RB Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator keberhasilan program adalah :
 - a. Rasio Konektifitas Wilayah;
 - b. Kinerja Lalu Lintas Jalan.



6.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari pencapaian program dan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut yang merupakan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.

Selanjutnya program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi program dan pendanaan indikatif, yang akan diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Cilegon selama kurun waktu tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran berikut :



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

PEMERINTAH KOTA CILEGON

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRASKPD

PERIODE : 2021-2026

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RENSTRA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
2	3	4	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15	18	
2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN				46,999,730,108		47,840,508,317		50,030,561,752		52,800,523,570		54,734,687,909		301,719,645,251	
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				27,734,730,108		28,189,658,164		28,726,189,458		29,765,463,373		31,185,945,818		165,716,305,219	
	Nilai Laki Perangkat Daerah	Point	60	62.32	17,435,405,371	65.25	17,950,231,427	68.76	18,486,762,721	68.8	19,526,036,636	70	20,233,500,056	70	110,761,650,898
0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				123,297,608		125,303,878		127,510,776		129,938,363		132,608,709		622,141,692	
0.00.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,479,107,763		16,991,927,549		17,526,251,945		18,083,098,273		18,202,891,347		102,463,969,611	
0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				50,000,000		50,000,000		50,000,000		530,000,000		1,090,000,000		2,955,260,433	
0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				783,000,000		783,000,000		783,000,000		783,000,000		808,000,000		4,720,279,162	
	Indeks RB Perangkat Daerah	Kategori/ Point	60	60.42	-	64.23	-	66.55	-	67.75	-	70	277,000,000	70	285,750,000
0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		277,000,000	285,750,000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	79.5	79.5	10,299,324,737	79.75	10,239,426,737	B	10,239,426,737	80.25	10,239,426,737	B	10,675,445,762	80.25	54,668,904,321
0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				805,392,410		796,094,410		796,094,410		796,094,410		906,113,435		4,870,282,591	
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				9,493,332,327		9,443,332,327		9,443,332,327		9,443,332,327		9,769,332,327		49,798,621,730	
2.15.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN				19,285,000,000		19,650,850,153		21,304,372,294		23,035,060,197		23,548,742,091		136,003,340,032	
	Rasio Konektivitas Wilayah	poin	37.5	50	18,815,000,000	62.5	18,900,850,153	75	20,280,600,000	87.5	21,794,100,000	100	22,058,742,091	100	125,480,884,692
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan				17,725,000,000		18,390,850,153		19,330,600,000		19,344,100,000		19,423,742,091		114,040,247,755	
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				100,000,000		100,000,000		200,000,000		1,700,000,000		1,850,000,000		4,587,652,651	
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan				100,000,000		100,000,000		250,000,000		250,000,000		275,000,000		1,508,998,074	
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				240,000,000		260,000,000		450,000,000		450,000,000		460,000,000		3,193,993,319	
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan				650,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		2,149,992,893	
	Kinerja Lalu Lintas Jalan	poin	0.4	0.4	450,000,000	0.4	750,000,000	0.42	1,023,772,294	0.42	1,240,960,197	0.44	1,490,000,000	0.44	10,522,455,340
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ				-		300,000,000		300,000,000		400,000,000		440,000,000		1,539,849,150	
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				450,000,000		450,000,000		723,772,294		740,960,197		950,000,000		8,582,635,190	
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				-		-		-		100,000,000		100,000,000		399,971,000	



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Program prioritas pembangunan tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026, untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas, dengan uraian lengkap sebagai berikut :

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
2. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
3. Peningkatan kualitas layanan public
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Perluasan Akses Kesehatan
6. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
7. Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah (IKM)
8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
9. Peningkatan Pendapatan Daerah
10. Penyediaan ruang publik yang representatif dan ramah difabel
11. Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota
12. Peningkatan destinasi wisata, pelestarian seni dan budaya serta pembinaan sejarah daerah
13. Pemasarakatan nilai-nilai luhur keagamaan
14. Peningkatan mitigasi bencana dan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
15. Peningkatan budidaya pertanian, nilai tambah produk pertanian serta diversifikasi pangan
16. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta kesatuan bangsa dan politik.
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan
18. Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
19. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga

Program Prioritas Dinas Perhubungan yang dijabarkan dalam focus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:



Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota

Peningkatan sarpras dan Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan visual kota, menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya tarik kota.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan visual kota akan difokuskan pada :

1). Peningkatan Kualitas Layanan Jalan dan Transportasi, dengan prioritas pada :

- Pembangunan Jalan Lingkar Utara bersinergi dengan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus ataupun pembiayaan lainnya;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kota
- Peningkatan jalan-jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan
- Peningkatan jalan akses ke lokasi wisata, Kawasan Pertanian Terpadu (KPT), dan jalan untuk jalur evakuasi dan mitigasi bencana.
- Melakukan kerjasama Pemerintah Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal

Berdasarkan prioritas daerah diatas Dinas Perhubungan masuk dalam Peningkatan kualitas infrastruktur dan visual kota, akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Cilegon tidak masuk dalam Prioritas Daerah / janji politik walikota terpilih, melainkan masuk dalam prioritas Daerah lainnya yang berkelanjutan dari RPJMD sebelumnya.

Penyelarasan Program Prioritas dengan Nomenklatur Program pada Permendagri 90 Tahun 2019

Dengan berlakunya Permendagri 90 tahun 2019 yang mengatur tentang kesegaragaman nomenklatur program, penyelarasan nomenklatur program sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Tabel VI-7 Penyalarsan Program dan Kegiatan Prioritas dengan Nomenklatur Program pada Permendagri 90 Tahun 2019

No	Program / Kegiatan Prioritas lainnya	Nama Program pada Permendagri 90	Nama Kegiatan Pada Permendagri 90
1	PJU Lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah antar kab/kota

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAERAH DENGAN RTRW KOTA CILEGON TAHUN 2020-2040

Keselarasan program prioritas daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 sebagaimana dijabarkan pada matriks sinkronisasi sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

Tabel VI-9 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Matriks Indikasi Program RTRW Kota Cilegon 2020-2040

No	Program / Kegiatan Prioritas Daerah	Usulan Program Utama		Lokasi	Instansi Pelaksana
		Perwujudan Pola Ruang Wilayah	Perwujudan Struktur Ruang		
11	Peningkatan kualitas infrastruktur visual kota				
	-PJU Lingkungan	- Peningkatan Kualitas Kawasan		Kawasan Sstrategis Kota	- DPUTR dan dinas terkait lainnya
	-Pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	-Pengembangn kawasan strategis dengan optimalisasi lahan yang ada dan penataan transportasi	- Perencanaan Terminal Type C di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak (pengadaan tanah dan pembangunan terminal Type C)	- Kecamatan Ciwandan - Kecamatan Pulomerak - Kawasan srategis kota	Dinas Perhubungan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bab ini dijelaskan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini disajikan dalam table berikut ini :

Tabel.7.1. Matrik Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Cilegon
Yang Mengacu Pada Sasaran Rpjmd Tahun 2021-2026

Table Tc.28

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	57.84 (CC)	58.35 (CC)	60.00	62.32	65.25	68.76	68.80	70.00	
2	Indeks RB Perangkat Daerah	15.29	15.65	60.00	60.42	64.23	66.55	67.75	70.00	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	78.27	78.5	79.50	79.50	79.75	80.10	80.25	80.25	
4	Rasio Konektivitas Wilayah	N/A	N/A	300/800= 37.50	400/800= 50.00	500/800= 62.50	600/800= 75.50	700/800= 87.50	800/800= 100	
5	Kinerja Lalu Lintas Jalan	N/A	N/A	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.44	



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Bahwa tantangan penyelenggaraan Perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan. Upaya dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dengan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, maka RPJMD Kota Cilegon ini harus menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2021-2026, dan akan menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan akhir RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021-2026 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Cilegon serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk menciptakan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat.

Cilegon, September 2021
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON**

H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP. 19681006 198803 1 001



LAMPIRAN



1. Definisi Operasional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1.1 Meningkatnya Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi										
		1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian oleh Evaluator	57.84 (CC)	58.35 (CC)	60	62.32	65.25	68.76	68.8	70
			Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian oleh Evaluator	15.29	15.65	60	60.42	64.23	66.55	67.75	70
			Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.27	78.5	79.5	79.5	79.75	80.1	80.25	80.25
2	5.1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat		Rata-Rata capaian kinerja Pelayanan jalan dan transportasi										
		5.1.1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan transportasi kota	Rasio Konektivitas Wilayah	%	Jumlah Angkot yang aktif / Jumlah kebutuhan angkot	N/A	N/A	$300/800 = 37,5$	$400/800 = 50$	$500/800 = 62.5$	$600/800 = 75$	$700/800 = 87.5$	$800/800 = 100$
			Kinerja Lalu Lintas Jalan	Poin	Volume kendaraan/ Kapasitas ruas jalan	N/A	N/A	0.4	0.4	0.4	0.42	0.42	0.44



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / CARA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian oleh Evaluator
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian oleh Evaluator
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan Permenpan 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	%	Jumlah Angkot yang aktif / Jumlah kebutuhan angkot
		Kinerja Lalu Lintas Jalan	Poin	Volume kendaraan/ Kapasitas ruas jalan (Berdasarkan Manajemen Kapasitas Jalan Indonesia 1997)

3. Pendanaan



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN) - RENSTRA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir RPJMD												
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			TARGET											
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN						46,999,730,108		47,840,508,317			50,030,561,752		52,800,523,570		54,734,687,909		301,719,645,251									
T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan						27,734,730,108		28,189,658,164			28,726,189,458		29,765,463,373		31,185,945,818		165,716,305,219									
S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,2 (BB)		27,734,730,108		28,189,658,164			28,726,189,458		29,765,463,373		31,185,945,818		165,716,305,219									
	Nilai Laki Perangkat Daerah	Point	60	62.32				65.25			68.76		68.8		70		70									
	Indeks RB Perangkat Daerah	Point	60	60.42				64.23			66.55		67.75		70		70									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	79.5	79.5				79.75			80.2		80.25		80.25		80.25									
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						27,734,730,108		28,189,658,164			28,726,189,458		29,765,463,373		31,185,945,818		165,716,305,219									
	Nilai Laki Perangkat Daerah	Point	60	62.32		17,435,405,371		65.25		17,950,231,427		68.76		18,486,762,721		68.8		19,526,036,636		70		20,233,500,056		70		110,761,650,898
0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						123,297,608		125,303,878			127,510,776		129,938,363		132,608,709		100	622,141,692								
0.00.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100		123,297,608		100		125,303,878		100		127,510,776		100	622,141,692									
	*Dokumen Penyusunan Renja yang disusun	Dokumen	1	1		30,000,000		1		30,000,000		1		30,000,000		1	30,000,000									
	*Dokumen Penyusunan Renstra yang disusun	Dokumen	1	1		-		1		-		1		-		1	-									
	*Peserta Forum OPD	Orang	55	1		-		1		-		1		-		1	-									
0.00.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						11,700,000		11,700,000			11,700,000		11,700,000		11,700,000		60,995,732									
	*Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		11,700,000		1		11,700,000		1		11,700,000		1	60,995,732									
0.00.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen						11,700,000		11,700,000			11,700,000		11,700,000		11,700,000		60,995,732									
	*Dokumen RKA-Perubahan SKPD	keg	1	1		11,700,000		1		11,700,000		1		11,700,000		1	60,995,732									
0.00.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						11,700,000		11,700,000			11,700,000		11,700,000		11,700,000		60,995,732									
	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1		11,700,000		1		11,700,000		1		11,700,000		1	60,995,732									
0.00.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-						11,700,000		11,700,000			11,700,000		11,700,000		11,700,000		60,995,732									
	*Dokumen DPA-Perubahan SKPD	Dokumen	1	0		11,700,000		0		11,700,000		0		11,700,000		0	60,995,732									
0.00.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian						26,434,904		26,434,904			26,434,904		26,434,904		26,434,904		187,070,916									
	*Dokumen SKM yang disusun	Dokumen	1	1		-		1		-		1		-		1	-									
	*Dokumen LAKIP yang disusun	Dokumen	1	1		26,434,904		1		26,434,904		1		26,434,904		1	187,070,916									
	*Dokumen Review Profil yang disusun	Dokumen	1	1		-		1		-		1		-		1	-									
0.00.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,062,704		22,068,974			24,275,872		26,703,459		29,373,805		161,087,848									
	*Dokumen Evaluasi Retribusi dan Kegiatan yang	Dokumen	1	1		20,062,704		1		22,068,974		1		26,703,459		1	161,087,848									
	*Dokumen Angkutan Lebaran yang disusun	Dokumen	1	1		-		1		-		1		-		1	-									
0.00.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16,479,107,763		16,991,927,549			17,526,251,945		18,083,098,273		18,202,891,347		102,463,969,611									
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100		16,479,107,763		100		16,991,927,549		100		17,526,251,945		100	102,463,969,611									
0.00.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16,277,107,763		16,789,927,549			17,324,251,945		17,881,098,273		18,000,891,347		101,252,958,325									
	*orang dan bulan yang terpenuhi gajinya	Bulan	12	12		16,277,107,763		12		16,789,927,549		12		17,324,251,945		12	101,252,958,325									
0.00.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						188,000,000		188,000,000			188,000,000		188,000,000		188,000,000		1,127,514,709									
	*Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan	bulan	12	0		188,000,000		0		188,000,000		0		188,000,000		0	1,127,514,709									
0.00.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan						14,000,000		14,000,000			14,000,000		14,000,000		14,000,000		83,496,577									
	*dokumen Laporan Keuangan SKPD Dinas	Dokumen	2	0		14,000,000		0		14,000,000		0		14,000,000		0	83,496,577									



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				50,000,000		50,000,000		50,000,000		530,000,000		1,090,000,000		2,955,260,433
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	530,000,000	100	1,090,000,000	100	2,955,260,433
0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				-						480,000,000		480,000,000		1,270,871,000
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	unit	2	1	-	1		1		1	480,000,000	1	480,000,000	1	1,270,871,000
0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau				-								560,000,000		1,434,389,433
	*Kendaraan Jabatan Roda 4 (2 Unit)	Unit	2	2	-	2		2		2		2	460,000,000	2	1,278,194,000
	*Kendaraan Jabatan Roda 2 (2 Unit)	Unit	6	2	-	2		2		2		2	100,000,000	2	156,195,433
0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000
	Jumlah jenis mebel yang disediakan	jenis	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	250,000,000
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				783,000,000		783,000,000		783,000,000		783,000,000		808,000,000		4,720,279,162
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	783,000,000	100	783,000,000	100	783,000,000	100	783,000,000	100	808,000,000	100	4,720,279,162
0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				610,000,000		610,000,000		610,000,000		610,000,000		610,000,000		3,659,124,800
	*Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan	Unit	38	38	610,000,000	38	610,000,000	38	610,000,000	38	610,000,000	38	610,000,000	38	3,659,124,800
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				123,000,000		123,000,000		123,000,000		123,000,000		123,000,000		786,154,362
	*Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Target	Unit	0	0	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000	0	437,425,000
	*Terpeliharanya Cat bangunan Gedung Kantor / 758	m2	758	758	50,000,000	758	50,000,000	758	50,000,000	758	50,000,000	758	50,000,000	758	348,729,362
0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		75,000,000		275,000,000
	Luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang	m2	0	758	50,000,000	758	50,000,000	758	50,000,000	758	50,000,000	758	75,000,000	758	275,000,000
	Indeks RB Perangkat Daerah	Kategori/ Point	60	60.42	-	64.23	-	66.55	-	67.75	-	70	277,000,000	70	285,750,000
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-		-		-		277,000,000		285,750,000
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	277,000,000	100	285,750,000
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				-		-		-		-		187,000,000		195,750,000
	*Pakaian Batik Tradisional	Stel	131	267	-	267	-	267	-	267	-	267	175,000,000	267	175,000,000
	*Pakaian Bengkel (7 Setel)	buah	14	7	-	7	-	7	-	7	-	7	12,000,000	7	20,750,000
0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				-		-		-		-		20,000,000		20,000,000
	*Pegawai Yang Pensiun 10 Orang	Orang	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	20,000,000	10	20,000,000
0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan				-		-		-		-				-
	*Upgrading Sertifikat Penguji (7 Orang)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	-
0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		-		70,000,000		70,000,000
	*Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (285 Orang)	Orang	0	285	-	285	-	285	-	285	-	285	70,000,000	285	70,000,000



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	79.5	79.5	10,299,324,737	79.75	10,239,426,737	B	10,239,426,737	80.25	10,239,426,737	B	10,675,445,762	80.25	54,668,904,321
0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					805,992,410		796,094,410		796,094,410		796,094,410		906,113,435		4,870,282,591
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	805,992,410	100	796,094,410	100	796,094,410	100	796,094,410	100	906,113,435	100	4,870,282,591
0.00.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		59,984,883
	*Alat Pembersih, Bahan Pembersih, dan Peralatan	Jenis	10	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	59,984,883
0.00.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					195,904,158		195,904,158		195,904,158		195,904,158		265,904,158		1,219,518,871
	*Makanan dan Minuman (12 Bulan)	bulan	8	12	95,904,158	12	95,904,158	12	95,904,158	12	95,904,158	12	95,904,158	12	649,518,871
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	0	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	170,000,000	12	570,000,000
0.00.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					400,190,252		400,190,252		400,190,252		400,190,252		440,209,277		2,441,160,537
	*Jumlah Barang Cetak Selama 12 Bulan	bulan	33	12	400,190,252	12	400,190,252	12	400,190,252	12	400,190,252	12	440,209,277	12	2,441,160,537
0.00.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan					39,898,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		189,796,000
	*Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	jenis	2	2	39,898,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	189,796,000
0.00.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					160,000,000		160,000,000		160,000,000		160,000,000		160,000,000		959,822,300
	*Akomodasi Perjalanan Rapat dalam Daerah Maupun	kali	36	36	150,000,000	36	150,000,000	36	150,000,000	36	150,000,000	36	150,000,000	36	899,826,600
	*Alat/Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)	bulan	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	59,995,700
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					9,443,332,327		9,443,332,327		9,443,332,327		9,443,332,327		9,769,332,327		49,798,621,730
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	9,443,332,327	100	9,443,332,327	100	9,443,332,327	100	9,443,332,327	100	9,769,332,327	100	49,798,621,730
0.00.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		29,599,000
	*Materai @3000	Lembar	929	700	5,000,000	800	5,000,000	900	5,000,000	1000	5,000,000	1100	5,000,000	1100	29,599,000
0.00.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					639,961,095		639,961,095		639,961,095		639,961,095		664,961,095		3,834,766,570
	*Pembayaran Jasa Komunikasi (Telephone) Selama	Bulan	12	12	564,961,095	12	564,961,095	12	564,961,095	12	564,961,095	12	564,961,095	12	3,359,766,570
	*Jasa promosi dan propaganda (12 Bulan)	Jenis	12	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	100,000,000	12	475,000,000
0.00.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					172,571,232		172,571,232		172,571,232		172,571,232		423,571,232		1,113,856,160
	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	0	22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	437,856,160
	Jumlah kegiatan hari-hari besar yg difasilitasi	Kegiatan	0	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	175,000,000
	Jumlah jenis komputer disediakan	jenis	0	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	240,000,000	2	360,000,000
	jumlah printer yang disediakan	Unit	0	11	20,000,000	11	20,000,000	11	20,000,000	11	20,000,000	11	61,000,000	11	141,000,000
0.00.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					8,675,800,000		8,625,800,000		8,625,800,000		8,625,800,000		8,675,800,000		44,820,400,000
	*Asuransi dan Honorarium Bagi Non PNS (158 Orang)	Orang	158	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	44,520,400,000
	*Media Informasi	Bulan	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000	0	300,000,000
	*Media Informasi	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	
	*Pemeliharaan Media Informasi	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	
	*Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (158 Orang)	0	0	0	773,000,000	0	773,000,000	0	773,000,000	0	773,000,000	0	773,000,000	0	
	*Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	120,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

75.1 Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup					19,265,000,000		19,650,850,153		21,304,372,294		23,035,060,197		23,548,742,091		136,003,340,032
Rata-Rata capaian kinerja Pelayanan jalan dan	%	100	100		100		100		100		100		100		100
55.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur					19,265,000,000		19,650,850,153		21,304,372,294		23,035,060,197		23,548,742,091		136,003,340,032
Rasio Konektivitas Wilayah	poin	37.5	50		62.5		75		87.5		100		100		100
Kinerja Lalu Lintas Jalan	poin	0.4	0.4		0.4		0.42		0.42		0.44		0.44		0.44
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN					19,265,000,000		19,650,850,153		21,304,372,294		23,035,060,197		23,548,742,091		136,003,340,032
Rasio Konektivitas Wilayah	poin	37.5	50		18,815,000,000		18,900,850,153		20,280,600,000		21,794,100,000		22,058,742,091		125,480,884,692
2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan					17,725,000,000		18,390,850,153		19,330,600,000		19,344,100,000		19,423,742,091		114,040,247,755
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan	%	100	100		17,725,000,000		18,390,850,153		19,330,600,000		19,344,100,000		19,423,742,091		114,040,247,755
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan					295,000,000		395,000,000		495,600,000		495,600,000		495,600,000		2,406,328,477
Jumlah pos Dishub yang dibangun	Unit	2	2		-		2		-		2		-		229,528,477
Jumlah halte yang dibangun	Unit	1	1		-		1		-		1		-		-
Jumlah kantong Parkir Off Street	Titik	0	1		-		0		-		0		-		0
Perlintasan Kereta Api yang dibangun	Titik	0	4		-		4		-		4		-		4
Jumlah personil penjaga pintu perlintasan KA	Orang	0	3		295,000,000		395,000,000		495,600,000		495,600,000		495,600,000		3
Jumlah terminal tipe C yang direvitalisasi	Titik	0	1		-		1		-		0		-		0
Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Titik	0	0		-		1		-		0		-		0
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan					2,000,000,000		2,430,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		31,907,839,609
Jumlah PJU yang terpasang (BANKEU)	titik	140	300		2,000,000,000		2,430,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		300
Jumlah sarana pendukung operasional PJU	Unit	0	0		-		0		-		0		-		0
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					-		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		249,942,041
Jumlah pintu perlintasan KA yang dipelihara	Titik	0	0		-		0		-		0		-		0
Jumlah Shelter SAUM yang dipelihara	Titik	0	0		-		0		-		0		-		0
Jumlah halte yang dipelihara	Titik	2	0		-		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		0
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan					15,430,000,000		15,515,850,153		15,785,000,000		15,798,500,000		15,878,142,091		79,476,137,628
Jumlah media informasi pelayanan PJU kepada	0	12	12		30,000,000		30,850,153		50,000,000		50,000,000		50,000,000		12
Jumlah kendaraan operasional PJU yang dipelihara	Unit	6	5		100,000,000		8		235,000,000		248,500,000		273,350,000		12
Jumlah PJU yang dipelihara	kecamatan	0	8		300,000,000		8		500,000,000		8		500,000,000		8
Jumlah pengaduan masyarakat terkait PJU yang	0	12	0		-		0		-		0		-		0
Jumlah tagihan PJU pertahun	0	12	12		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		12
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					100,000,000		100,000,000		200,000,000		1,700,000,000		1,850,000,000		4,587,652,651
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100		100,000,000		100,000,000		200,000,000		1,700,000,000		1,850,000,000		100
2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal					-		-		-		-		-		-
Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	Dokumen	0	0		-		0		-		0		-		0
2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal					-		-		-		1,500,000,000		1,650,000,000		3,150,000,000
Jumlah Prasarana yang dibangun	Unit	0	0		-		0		-		1		1,650,000,000		1
2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					-		-		-		-		-		-
Jumlah fasilitas penunjang operasional terminal yang	Buah	0	0		-		0		-		0		-		0
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,437,652,651
Jumlah prasarana terminal yang direhabilitasi	Unit	1	0		-		0		-		0		-		0
Jumlah biaya operasional UPT terminal	Kegiatan	0	1		100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1
					100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,137,724,036



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

2.15.02.2.04.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan					100,000,000			100,000,000		250,000,000		250,000,000		275,000,000		1,508,998,074
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	275,000,000	100	1,508,998,074	
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					100,000,000			100,000,000		250,000,000		250,000,000		275,000,000		1,508,998,074
	*Pengadaan Mobil Derek (1 unit)	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	*Alat Gembok Roda (4 Unit)	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	Jumlah biaya operasional UPT Perparkiran	Kegiatan	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	1,508,998,074	
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					240,000,000			260,000,000		450,000,000		450,000,000		460,000,000		3,193,993,319
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	240,000,000	100	260,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	460,000,000	100	3,193,993,319	
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian					-			-		-		-		-		329,963,090
	Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan	Unit	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	329,963,090
	Jumlah pengadaan mobil uji XIR keliling	Unit	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala					150,000,000			170,000,000		310,000,000		310,000,000		310,000,000		1,539,963,094
	Jumlah aplikasi data yang dipelihara	Buah	0	0	-	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	80,000,000	
	Jumlah kartu uji Smart Card yang diadakan	Buah	0	11000	150,000,000	11000	150,000,000	11000	290,000,000	11000	290,000,000	0	290,000,000	0	1,459,963,094	
2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur					-			-		-		-		-		74,967,476
	Jumlah peserta sosialisasi penerapan kartu uji /	Orang	200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	74,967,476
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian					50,000,000			50,000,000		100,000,000		100,000,000		110,000,000		1,007,903,748
	Jumlah bangunan gedung pengujian yang	Titik	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	597,903,748
	Jumlah alat uji yang dipelihara	Buah	9	9	50,000,000	9	50,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	110,000,000	9	410,000,000	
	Jumlah pengadaan sarana pendukung pengujian	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan					40,000,000			40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		241,195,911
	Jumlah Kendaraan yang diuji	Unit	200	200	40,000,000	200	40,000,000	200	40,000,000	200	40,000,000	200	40,000,000	200	241,195,911	
	Jumlah bus AKAP yang diperiksa kelaikannya	Unit	200	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	-
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan					650,000,000			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		2,149,992,893
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	650,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	2,149,992,893	
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa					50,000,000			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000
	Jumlah stiker untuk angkutan perkotaan yang	Buah	0	900	50,000,000	925	50,000,000	950	50,000,000	975	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000	
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan					600,000,000			-		-		-		-		1,899,992,893
	0	Unit	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	1,299,992,893
	0	Unit	2	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-
	0	Titik	1	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-
	Jumlah Modifikasi armada SAUM	unit	0	4	600,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	600,000,000



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

	Kinerja Lalu Lintas Jalan	point	0.4	0.4	450,000,000	0.4	750,000,000	0.42	1,023,772,294	0.42	1,240,960,197	0.44	1,490,000,000	0.44	10,522,455,340
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ					-		300,000,000		300,000,000		400,000,000		440,000,000		1,539,849,150
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	%	100	100	-	100	300,000,000	100	300,000,000	100	400,000,000	100	440,000,000	100	1,539,849,150
2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk					-		300,000,000		300,000,000		400,000,000		440,000,000		1,440,000,000
	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan	Dokumen	0	0	-	0	300,000,000	0	300,000,000	0	400,000,000	0	440,000,000	0	1,440,000,000
	Jumlah dokumen kajian pengelolaan operasional	Dokumen	0	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana					-		-		-		-		-		99,849,150
	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	Peserta	170	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	99,849,150
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas					450,000,000		450,000,000		723,772,294		740,960,197		950,000,000		8,582,635,190
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan	%	100	100	450,000,000	100	450,000,000	100	723,772,294	100	740,960,197	100	950,000,000	100	8,582,635,190
2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan					450,000,000		450,000,000		723,772,294		740,960,197		950,000,000		7,448,866,939
	Jumlah kendaraan operasional Patwal	Unit	0	10	250,000,000	10	250,000,000	10	350,000,000	10	440,960,197	10	450,000,000	10	1,740,960,197
	Panjang guardrail yang dipasang	m2	112	0	100,000,000	0	100,000,000	0	130,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000	0	4,764,134,448
	Jumlah pengadaan rambu portable, cermin lalu-paket		80	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Jumlah pengadaan rambu standar	Buah	43	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000
	Jumlah sarana operasional perlengkapan jalan yang		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah titik pengamanan lalu-lintas	Titik	9	8	100,000,000	8	100,000,000	8	243,772,294	8	200,000,000	8	200,000,000	8	843,772,294
	Jumlah HT dan Reapeter yang diadakan	Buah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas					-		-		-		-		-		1,133,768,251
	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	533,998,074
	0	keg	7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	599,770,177
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					-		-		-		100,000,000		100,000,000		399,971,000
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	399,971,000
2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan					-		-		-		100,000,000		100,000,000		399,971,000
	Jumlah kendaraan angkutan barang yang diinspeksi	Unit	55	0	-	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	399,971,000
	Jumlah kendaraan angkutan orang yang diinspeksi	Unit	55	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

4. Teknokrat Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat																				
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang, Infrastruktur Kota, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman																			
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					60,312,245,239	66,817,788,864	70,893,231,851		80,640,159,136		84,288,555,460						
				1. Rasio Konektivitas wilayah	Perbandingan Jumlah Angkot yang aktif dengan Jumlah Kebutuhan Angkot															
				2. Kinerja lalu lintas Jalan	Perbandingan antara Volume Kendaraan dengan Kapasitas Ruas Jalan															



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		1. Rasio Konektivitas		50.00%	53.712,245,239	62.50%	64,477,788,864	75.00%	68,113,231,851	87.50%	77,820,159,136	100.00%	81,174,555,460			
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota			910,000,000		630,000,000		440,000,000		460,000,000		576,000,000			
			Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disusun	Dokumen												
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun													
			*Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJT)	Dokumen	1	800,000,000										
			*Penyusunan Tatralok Manajemen Rekayasa Lalulintas	Dokumen			1	500,000,000								
			Kajian Kebutuhan Fasilitas Lalulintas	Dokumen					1	300,000,000						
			Area Traffic Control System (ATCS)	Dokumen							1	400,000,000				
	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan													
			*Peserta Penyuluhan Tertib dan Disiplin Berlalu lintas	Peserta	170	110,000,000	170	130,000,000	170	140,000,000	170	160,000,000	176,000,000			
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			44,170,536,245		55,506,629,870		61,817,572,857		70,635,050,142		74,948,555,156			
			Prasartase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan													
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun													
			*POS Dishub yang dibangun (Kec. Cibeber dan Citangkil)	Unit	2	145,000,000	2	159,500,000	2	175,450,000	2	192,995,000	212,294,500			
			*Jumlah halte yang dibangun (Kec. Cibeber)	Unit	1	105,000,000	1	115,500,000	1	127,050,000	1	139,755,000	153,730,500			
			*Kantong Parkir Off Street	Titik	1	10,000,000,000										
			*Perlintasan Kereta Api yang dibangun (4 Lokasi)	Titik	4	2,640,000,000	4	2,904,000,000	3	2,395,800,000	3	2,635,380,000	2,898,918,000			
			*Penjaga Pintu Perlintasan (3 orang x 14 bulan x 4 lokasi)	Orang	3	495,600,000	3	991,200,000	3	1,486,800,000	3	1,982,400,000	2,180,640,000			
			*Peningkatan Kapasitas SDM Penjaga Pintu Perlintasan KA (3 orang x 4 lokasi)	Orang	12	120,000,000	24	240,000,000	36	360,000,000	48	480,000,000	528,000,000			
			*Revitalisasi Terminal Type C	Titik	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1					
			*Pembangunan Terminal Type C	Titik			1	10,000,000,000	1	11,000,000,000	1	12,100,000,000	13,310,000,000			



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
			*PJU yang terpasang	Buah		600	4,130,000,000	600	13,200,000,000	600	16,520,000,000	600	18,172,000,000	561	19,989,200,000					
			*Sarana Pendukung Operasional PJU	Unit		3	2,370,000,000					4	2,500,000,000							
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara																
			*Halte yang dipelihara (Kota Cilegon)	Titik		2	54,936,245	2	60,429,870	2	66,472,857	2	73,120,142	2	80,432,156					
			*Jumlah Shelter SAUM yang dipelihara (4 lokasi)	Titik		4	200,000,000	4	220,000,000	4	242,000,000	4	266,200,000	4	292,820,000					
			*Pemeliharaan Pintu Perlintasan Kereta Api (4	Titik		4	200,000,000	8	440,000,000	12	968,000,000	16	2,129,600,000	21	2,342,560,000					
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
			*Informasi Pelayanan PJU Kepada Masyarakat Kota	Bulan		12	100,000,000	12	110,000,000	12	121,000,000	12	133,100,000	12	146,410,000					
			*Pemeliharaan Kendaraan Operasional PJU	Unit		5	110,000,000	8	166,000,000	8	235,000,000	8	248,500,000	12	273,350,000					
			*Pemeliharaan PJU	Kecamatan		8	4,000,000,000	8	4,400,000,000	8	4,840,000,000	8	5,324,000,000	8	5,856,400,000					
			*Penunjang Pelayanan PJU	Bulan		12	1,300,000,000	12	1,400,000,000	12	1,510,000,000	12	1,631,000,000	12	1,794,100,000					
			*Pembayaran Verifikasi tagihan PJU	Bulan		12	17,000,000,000	12	20,100,000,000	12	20,570,000,000	12	22,627,000,000	12	24,889,700,000					
			*Peningkatan Kapasitas SDM Petugas PJU	Orang		35	200,000,000			35	200,000,000									
		2.15.02.2.03	UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan				1,160,550,000		1,905,000,000		1,375,000,000		2,445,000,000		952,000,000					
			Presentase Sarana Prasarana pada UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan																	
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Type C	Jumlah Dokumen yang disusun																
			*DED Terminal Type C	Dokumen		1	260,000,000	1	280,000,000	1	300,000,000	1	320,000,000	1	352,000,000					
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Prasarana yang dibangun																
			*Kios Semi Permanen	titik								1	1,500,000,000							
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Prasarana yang dibangun																
			*Fasilitas Penunjang Operasional Terminal Type C (rambu lalu lintas dan lampu penerangan)	Lokasi		1	450,275,000													
			*Pemasangan awning gedung Terminal Seruni (Lahan Parkir)	Lokasi				1	750,000,000											
			*Jumlah Pos Jaga dan Fasilitas Ruang Tunggu (Pintu masuk & keluar)	Lokasi						1	550,000,000									



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu Uji														
			*Pengadaan Kartu Uji Smart Card		Buah	11,000	289,963,094	11,000	289,963,094	11,000	289,963,094	11,000	289,963,094	11,000	318,959,403			
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala	Jumlah Peserta Sosialisasi														
			*Peserta yang mengikuti sosialisasi Penerapan Kartu Uji/Smart Card		Orang													
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di pelihara														
			*Bangunan Gedung Pengujian yang direhab (Kec. Cibeber)		Titik	1	600,000,000	1	500,000,000									
			*Pemeliharaan Alat Uji yang dipelihara		Buah	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	110,000,000			
			*Pengadaan Sarana Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor		Unit	1	200,000,000			1	200,000,000							
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji														
			Pemeriksaan Kendaraan Wajib Uji (Pick up,Truk)		Unit	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950			
			*Rameck Kendaraan Angkutan Bus AKAP		Unit	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950	200	20,597,950			



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					5,860,000,000		3,215,000,000		3,289,500,000		3,558,950,000		3,908,845,000				
				V/C Ratio																
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan																
				*111 M Guadrill (Pagar Pengaman Jalan)	m2	111		111			111		111		111					
				*0 (paket) Zona Keselamatan Sekolah	Titik	1	1,400,000,000	1	1,600,000,000	1	1,800,000,000	1	2,000,000,000	1	2,200,000,000					
				*30 Rambu Portable, 20 Cermin Lalu Lintas, 30 Rambu Standar	Buah	80		80			80		80		80					
				*42 Rambu Standar	Buah	42		42			42		42		42					
				*Pengadaan Sarana Operasional Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Unit	1	3,000,000,000													
				*Pengadaan HT dan Instalasi	Buah	15	90,000,000	50	250,000,000	5	25,000,000									
				*Pengadaan 1 Reapeter dan Instalasi	Unit	1	100,000,000													
				*Pengamanan Lalu Lintas - Pos Simpang Kenanga - Simpang 3 Seruni - Pintu Masuk Jalan Aat Rusli - Pos PCI - Pos Rumdin - Depan PEMDA - BJB - HOTEL SUKMA - Pos Pintu Keluar Jalan Aat Rusli - dan Pengawasan di Titik - titik tertentu	Titik	8	200,000,000	8	220,000,000	8	240,000,000	8	260,000,000	8	280,000,000					
				*Operasional Kendaraan Patwal DISHUB	Unit	10	450,000,000	10	495,000,000	10	544,500,000	10	598,950,000	10	658,845,000					
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik pengamanan																
				*11 titik Pos Pengamanan Angkutan Lebaran dan Pengalihan, Pengelola Transportasi	Titik	11	620,000,000	11	650,000,000	11	680,000,000	11	700,000,000		770,000,000					
			JUMLAH				53,712,245,239	64,477,788,864	68,113,231,851	77,820,159,136	81,174,555,460	-	-	-						



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2. Kinerja Lalulintas Jalan				0.40%		6,600,000,000		0.40%		2,340,000,000		0.42%		2,780,000,000		0.42%		2,820,000,000		0.44%		3,114,000,000		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						3,900,000,000						200,000,000												
			Persentase Kendaraan yang diuji dan wajib uji																							
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan																							
			*Pengadaan Peralatan/Alat-alat Pengujian Kendaraan	Set			1	400,000,000					1	200,000,000												
			*Pengadaan Mobil Uji KIR Keliling	Unit			1	3,500,000,000																		
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						220,000,000		240,000,000				260,000,000			280,000,000							300,000,000		
			Persentase kendaraan yang di inspeksi																							
	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diinspeksi																							
			*Angkutan Barang dalam 11 Bulan	Bulan			11	220,000,000		11		240,000,000		11	260,000,000		11	280,000,000		11		300,000,000				
			*Angkutan Orang dalam 11 Bulan	Bulan			11			11				11			11				11					
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota						2,480,000,000		2,100,000,000				2,320,000,000			2,540,000,000							2,814,000,000		
			Presentase Awak Angkutan Umum terhadap standar keselamatan																							
	2.15.02.2.09.01	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/ Kota	Pengawasan Angkutan Kota																							
			*Angkutan Perkotaan se Kota Cilegon	Unit			30	365,000,000		30	373,000,000		30	381,000,000		30	389,000,000		30				413,000,000			
			*Stiker Angkutan Perkotaan yang tersedia	Lembar			900	45,000,000		925	51,000,000		950	57,000,000		975	63,000,000		100				78,000,000			
			*Supir Teladan Awak Angkutan Massal yang mengikuti Pembinaan	Orang			150	70,000,000		150	76,000,000		150	82,000,000		150	88,000,000		150				103,000,000			



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.02.2.09.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan														
			*Armada yang Beroperasi	Unit	4	810,000,000	4	890,000,000	4	970,000,000	4	1,050,000,000	4	1,130,000,000				
			*Armada SAUM	Unit	4	470,000,000	4	530,000,000	4	590,000,000	4	650,000,000	4	730,000,000				
			*Shelter Bus SAUM	Titik	3	120,000,000	3	180,000,000	3	240,000,000	3	300,000,000	3	360,000,000				
			*Modifikasi Kendaraan SAUM	Unit	4	600,000,000												
			JUMLAH			6,600,000,000		2,340,000,000		2,780,000,000		2,820,000,000		3,114,000,000				
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			2,810,000,000		2,257,000,000		2,414,000,000		9,766,000,000		2,822,600,000				
			1. Cakupan pelayanan TUKS															
			2. Prosentase sarana prasarana pelayaran															
			1. Cakupan Pelayanan TUKS			340,000,000		365,000,000		420,000,000		450,000,000		495,000,000				
		2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan			340,000,000		365,000,000		420,000,000		450,000,000		495,000,000				
			Jumlah Penyelesaian Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu SBNP	Jumlah Unit Rambu yang Terpelihara														
		2.15.03.2.05.01	Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan	Jumlah Unit Rambu yang Terpelihara														
			Pemeliharaan Rambu SBNP		3	180,000,000	4	200,000,000	5	250,000,000	6	275,000,000	7	302,500,000				
		2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Perusahaan yang Telah Melaksanakan Sounding Alur Sandar Kapal Dermaga dan Sekitarnya														
			*Jumlah Data Perusahaan yang telah di sounding dan terawasi di wilayah kota Cilegon	Dokumen	1	160,000,000	1	165,000,000	1	170,000,000	1	175,000,000	1	192,500,000				



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

				2. Prosentase Sarana Prasarana Pelayaran					2,470,000,000		1,892,000,000		1,994,000,000		9,316,000,000		2,327,600,000		
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						85,000,000		160,000,000		215,000,000		265,000,000		291,500,000		
				Jumlah Dokumen Kajian/ Pertimbangan Hukum/ Pertimbangan Teknis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan															
		2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoprasian Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Tersusun/ Laporan Legal Opinion bagi Pelaksanaan Kegiatan														
				*Pendapat dan Pertimbangan Hukum Pengadaan Rambu SBNP dan Mouring Boy		Dokumen	1		85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	93,500,000		
		2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Mouringboy yang terpelihara														
				*Pemeliharaan Mouringboy		Unit				1	75,000,000	1	130,000,000	1	180,000,000	1	198,000,000		
		2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota						1,650,000,000		935,000,000		945,000,000		980,000,000		1,078,000,000		
				Jumlah Unit Rambu SBNP Terbangun															
		2.15.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Rambu SBNP Terbangun														
				*Pengadaan Rambu SBNP (2 Unit)		Unit	2		1,500,000,000	1	775,000,000	1	775,000,000	1	800,000,000	1	880,000,000		



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Tersusun															
				*Jasa Konsultansi	Dokumen	1	150,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000	1	180,000,000	1	198,000,000				
		2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota				650,000,000		710,000,000		745,000,000		7,980,000,000		858,000,000				
				Jumlah Unit Mouringboy Terbangun															
		2.15.03.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Unit Terbangun Bangunan Mouringboy															
				*Pengadaan Mouringboy (1 Unit)	Unit	1	500,000,000	1	550,000,000	1	575,000,000	1	600,000,000	1	660,000,000				
		2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian tersusun															
				*Jasa Konsultansi	Dokumen	1	150,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000	1	180,000,000	1	198,000,000				
				Pengadaan Kapal Pengawasan	Unit							1	7,200,000,000						



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal					85,000,000		87,000,000		89,000,000		91,000,000		100,100,000		
				Jumlah Dokumen Kajian/ Pertimbangan Hukum/ Pertimbangan Teknis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan														
		2.15.03.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kajian/Pertimbangan Hukum /Pertimbangan Teknis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan													
				*Pendapatan dan pertimbangan Hukum pengadaan rambu SBNP dan Mouringboy	Dokumen	1	85,000,000	1	87,000,000	1	89,000,000	1	91,000,000	1	100,100,000			
JUMLAH								2,810,000,000	2,257,000,000	2,414,000,000	9,766,000,000	2,822,600,000						
VISI : MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT																		
MISI-1 : MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG																		
Meningkatnya Layanan Pemerintahan																		
				Indeks Reformasi Birokrasi														
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah																	
				Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip Perangkat Daerah yang tersusun	Kategori/Point	62.32	65.25	68.76	68.8	70							
	Meningkatnya profesionalitas aparatur																	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang tersusun	Kategori/Point	60.42	64.23	66.55	67.75	70							
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersedia	Point	79.5	79.75	80.1	80.25	80.25							



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							30,713,880,319		32,814,505,959		34,961,132,963		37,189,823,541		40,908,805,896		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							865,750,000		865,350,000		865,350,000		865,350,000		951,885,000		
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi															
					*Upgrading Sertifikat Penguji (7 Orang)					1,400,000										
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
					*Pakaian Dinas	Stel		267	534,600,000	267	534,600,000	267	534,600,000	267	534,600,000	267	534,600,000	267	588,060,000	
					*Pakaian Bengkel (7 Setel)	Stel		7	9,750,000	7	10,750,000	7	10,750,000	7	10,750,000	7	10,750,000	7	11,825,000	
		2.15.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	
					*Pegawai Yang Pensiun 10 Orang	Orang		10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	22,000,000	
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
					*Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi (285 Orang)	Orang		285	300,000,000	285	300,000,000	285	300,000,000	285	300,000,000	285	300,000,000	285	330,000,000	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17,161,335,176		18,877,469,294		20,765,215,623		22,841,737,460		25,125,911,206		
		2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD dibagi Target pelaksanaan x100%															
					*Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	Dokumen			231,014,000		254,116,000		279,527,000		307,480,000		338,228,000			



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dibagi Target pelaksanaan x100%															
				*dokumen Laporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang disusun		Dokumen		15,525,000	17,077,500	18,785,250	20,663,750	22,730,125							
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase kenaikan tukinda ASN (dari tahun dasar)															
				*orang dan bulan yang terpenuhi gajinya		Orang/Bulan		16,914,796,176	18,606,275,794	20,466,903,373	22,513,593,710	24,764,953,081							
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat					890,893,516	1,030,893,516	1,060,893,516	1,080,893,516	1,188,982,868							
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
				*Makanan dan Minuman (12 Bulan)		Bulan	12	189,998,081	209,998,081	229,998,081	249,998,081	274,997,889							
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
				*Jumlah Barang Cetak Selama 12 Bulan		Bulan	12	400,190,252	400,190,252	400,190,252	400,190,252	440,209,277							
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
				*Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 Jenis)		Jenis	2	39,898,000	39,898,000	39,898,000	39,898,000	43,887,800							
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
				*Akomodasi Perjalanan Rapat dalam Daerah Maupun Luar Daerah (36 Kali)		Kali	36	200,826,600	300,826,600	300,826,600	300,826,600	330,909,260							
		2.15.01.2.06.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
				*Alat/Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)		Bulan	12	29,995,700	39,995,700	39,995,700	39,995,700	43,995,270							



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
				*Alat Pembersih, Bahan Pembersih, dan Peralatan (10 Jenis)		Jenis	10	29,984,883	10	39,984,883	10	49,984,883	10	49,984,883	10	54,983,371			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,097,152,400		1,146,152,400		1,201,152,400		1,156,152,400		1,271,767,640			
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
				*Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional R2 (22 Unit)R4 (16 Unit)		Unit	38	746,152,400	38	786,152,400	38	786,152,400	38	786,152,400	38	864,767,640			
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
				*Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Target 80%		Unit		101,000,000		110,000,000		115,000,000		20,000,000		22,000,000			
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
				*Terpeliharanya Cat bangunan Gedung Kantor (758 m2)		m2	758	250,000,000	758	250,000,000	758	300,000,000	758	350,000,000	758	385,000,000			
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					685,095,714		815,095,714		925,095,714		1,035,095,714		1,138,605,285			
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
				*Kendaraan Jabatan Roda 4 (2 Unit)		Unit	2	476,200,000	2	576,200,000	2	676,200,000	2	776,200,000	2	853,820,000			
				*Kendaraan Jabatan Roda 2 (2 Unit)		Unit	2	100,195,433	2	120,195,433	2	120,195,433	2	120,195,433	2	132,214,976			
			Pengadaan Meubel		Jumlah Pengadaan Mebel														
				*Meubel Kantor 5 Jenis		Jenis	5	108,700,281	5	118,700,281	5	128,700,281	5	138,700,281	5	152,570,309			



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9,739,738,291		9,778,238,291		9,811,988,291		9,846,013,291		10,830,614,620			
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia															
			*ATK yang disediakan (22 Jenis)	Jenis		22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	87,571,232	22	96,328,355		
			*kegiatan Hari-Hari Besar yg di fasilitasi	Jenis		1	64,220,000	1	74,220,000	1	84,220,000	1	84,220,000	1	84,220,000	1	92,642,000		
			*pemuhan kebutuhan komputer + Laptop (2 Jenis)	Buah		2	219,428,000	2	219,428,000	2	219,428,000	2	219,428,000	2	219,428,000	2	241,370,800		
			*Pemenuhan Printer (11 Unit)	Buah		11	55,757,964	11	55,757,964	11	55,757,964	11	55,757,964	11	55,757,964	11	61,333,760		
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia															
			*Materai @10000	Lembar		700	7,000,000	800	8,000,000	900	9,000,000	1000	10,000,000	1100	11,000,000	1100	11,000,000		
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia															
			*jasa promosi dan propaganda (12 Bulan)	Bulan		12	85,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000		
			* Pembayaran Jasa Komunikasi (Telephone) Selama 12 Bulan	Bulan		12	564,961,095	12	584,961,095	12	604,961,095	12	624,961,095	12	644,961,095	12	687,457,205		
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan															
			*Asuransi dan Honorarium Bagi Non PNS (158 Orang)	Orang		158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	7,657,800,000	158	8,423,580,000		
			*Media Informasi	Bulan			50,000,000												
			*Pemeliharaan Media Informasi	Bulan		12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	12	33,275,000	12	36,602,500	12	36,602,500		
			*Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (158 Orang)	Orang / Bulan		158	773,000,000	158	823,000,000	158	823,000,000	158	823,000,000	158	823,000,000	158	905,300,000		
			*Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Gedung		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	165,000,000		
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				273,915,222		301,306,744		331,437,419		364,581,160		401,039,277				
		2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun/Target yang harus disusunx100%															
			*Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	11,710,000	1	12,881,000	1	14,169,100	1	15,586,010	1	17,144,611	1	17,144,611		



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON

VISI DISHUB: TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN, DAN BERMARTABAT

		2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD/Target yang harus disusun x 100%																
			*Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	11,710,000	1	12,881,000	1	14,169,100	1	15,586,010	1	17,144,611					
		2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD / Target yang harus disusun x 100%																
			*Dokumen RKA-Perubahan SKPD		Dokumen	1	11,710,000	1	12,881,000	1	14,169,100	1	15,586,010	1	17,144,611					
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/Target yang harus disusun x 100%																
			*Dokumen Penyusunan Renja yang disusun		Dokumen	1	18,763,704	1	20,640,074	1	22,704,082	1	24,974,490	1	27,471,939					
			*Dokumen Penyusunan Renstra yang disusun		Dokumen	1	30,504,704	1	33,555,174	1	36,910,692	1	40,601,761	1	44,661,937					
			*Peserta Forum OPD		Orang	55	68,037,486	55	74,841,235	55	82,325,358	55	90,557,894	55	99,613,683					
		2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun/Target yang harus disusun x 100%																
			*Dokumen DPA- Perubahan SKPD		Dokumen	1	11,710,000	1	12,881,000	1	14,169,100	1	15,586,010	1	17,144,611					
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja																
			*Dokumen LAKIP yang disusun		Dokumen	1	21,278,704	1	23,406,574	1	25,747,232	1	28,321,955	1	31,154,151					
			*Dokumen SKM yang disusun		Dokumen	1	19,631,461	1	21,594,607	1	23,754,068	1	26,129,475	1	28,742,422					
			*Dokumen Review Profil yang disusun		Dokumen	1	26,434,904	1	29,078,394	1	31,986,234	1	35,184,857	1	38,703,343					
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Target yang harus dievaluasi x 100%																
			*Dokumen Evaluasi Retribusi dan Kegiatan yang disusun		Dokumen	1	20,062,704	1	22,068,974	1	24,275,872	1	26,703,459	1	29,373,805					
			*Dokumen Angkutan Lebaran yang disusun		Dokumen	1	22,361,555	1	24,597,711	1	27,057,482	1	29,763,230	1	32,739,553					
		JUMLAH						93,836,125,558		101,889,294,823		108,268,364,814		127,595,982,677		128,019,961,355				